



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.342 / 31 / DPRD-BLG /2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi berkenaan harmonisasi produk hukum daerah antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan atas keputusan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan akan disepakati dan ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor : 130.5/022/PEM/TAHUN 2022 dan Nomor 188.342/17/DPRD-BLG/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

- : 11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Memperhatikan :  
- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, pada tanggal 05 Desember 2022;  
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023;

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, yaitu dalam hal:

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 188.342/29/DPRD-BLG/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Paringin  
pada tanggal : 19 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IFDALL, S. Sos

Wakil Ketua,



HANIL TAMJID

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.342/31/DPRD-BLG/ 2022  
TANGGAL : 19 Desember 2022

| NO  | JUDUL RAPERDA                                                                                                       | PENGUSUL                       | KET |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                 | (3)                            | (4) |
| 1.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah                  | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 2.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kearsipan                                     | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 3.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Balangan             | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 4.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah                      | DPRD Kabupaten Balangan        |     |
| 5.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Gotong Royong Masyarakat                                      | DPRD Kabupaten Balangan        |     |
| 6.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Pelestarian Kebudayaan Balangan                               | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 7.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Kepada PT Bank Kalsel          | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 8.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi                    | Pemerintah Daerah Kab.Balangan |     |
| 9.  | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perkebunan Karet                                 | DPRD Kabupaten Balangan        |     |
| 10. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata                                  | DPRD Kabupaten Balangan        |     |
| 11. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penanganan dan Perlindungan Anak Yatim Piatu dan Fakir Miskin | DPRD Kabupaten Balangan        |     |

|     |                                                                                                                                                                        |                                 |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 12. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 13. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi                       | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 14. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah                                                                                        | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 15. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Bangunan Gedung                                                                                                  | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 16. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Pemukiman       | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 17. | Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada PDAM                                                                                                        | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 18. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Tentang Penggabungan Desa                                                                                                | Pemerintah Daerah Kab.Balangan  |  |
| 19. | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Perubahan Atas Perwakilan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | DPRD Kabupaten Balangan         |  |
| 20. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan                                                                            | DPRD Kabupaten Balangan         |  |
| 21. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Balangan                                                                   | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |
| 22. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                                     | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |
| 23. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Kelembagaan Adat di Kabupaten Balangan                                                                                      | DPRD Kabupaten Balangan         |  |
| 24. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2021                                                                                           | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |

|     |                                                                                                            |                                 |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 25. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |
| 26. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023                              | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |
| 27. | Rancangan Perda Kabupaten Balangan tentang APBD Tahun Anggaran 2024                                        | Pemerintah Daerah Kab. Balangan |  |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Ketua,



AHSAN FAUZAN, SE

Wakil Ketua,



M. IFDALL, S. Sos

Wakil Ketua,



HANIL TAMJID